

Home Opini

HIV/AIDS dan Prostitusi di Kota Padang: Noktah Hitam di Negeri Bersendi Syarak

Rabu, 09 Mei 2018



Dr. Hardisman Dasman

Oleh: Hardisman

Secara superfisial, masyarakat sudah mengenal penyakit infeksi HIV/AIDS dan bahaya yang ditimbulkannya pada orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Penyakit ini menjadi menakutkan baik secara biologis, klinis, atau pun sosial. Namun, angka kejadian penyakit ini terus mengalami peningkatan baik secara global, nasional ataupun di Kota Padang.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa hingga akhir 2015 ada 3,3% penduduk dunia yang telah meninggal akibat menderita AIDS, atau sekitar 200 juta. Bahkan pada tahun 2015 saja tercatat 36,7 juta penduduk dunia menderita HIV, yang diantaranya 2,1 juta merupakan kasus baru.

HIV/AIDS juga telah mengancam Indonesia. Sejak ditemukannya pertama kali tahun tiga puluh tahun yang lalu pada tahun 1987, kasus yang ditemukan terus mengalami peningkatan. Sebagaimana yang

dilaporkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, bahwa hingga awal tahun 2016 penderita HIV positif sudah tercatat sebanyak 191.073 orang, dan AIDS 77.940 orang. Jumlah temuan ini mengalami peningkatan hampir empat kali lipat dari kumulatif kasus pada tahun 2014, yang saat itu berjumlah 50.296 kasus HIV.

Masalah HIV/AIDS di Sumatera Barat dan Kota Padang juga tidak dapat diabaikan. Jumlah kasus HIV/AIDS di provinsi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Case rate kasus HIV pada tahun 2015 dilaporkan 24,05/100.000 penduduk, artinya dengan jumlah penduduk yang 4,8 juta pada saat itu, maka diprediksi kasus HIV/AIDS mencapai 1.100 kasus. Tingginya rate kasus HIV/AIDS ini lebih tinggi dari rata-rata nasional (19,1/100.000 penduduk). Sehingga pada tahun 2016 menjadikan Provinsi Sumatera Barat masuk daam 10 besar dengan kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Meskipun tahun 2017 terjadi perbaikan peringkat menjadi 20 besar, bukan berarti Sumatera Barat mengalami perbaikan, namun terjadi peningkatan kasus di daerah-daerah lain.

Kota Padang, sebagai Ibu Kota Provinsi juga merupakan daerah dengan kasus HIV terbanyak di Sumatera Barat. Case rate HIV/AIDS di Kota Padang dilaporkan 56,96/100.000 pada tahun 2015. Maka, dengan populasi di Kota Padang 1 juta jiwa maka diprediksi ada 569 orang penderita HIV/AIDS Kota ini. Hal ini menunjukkan, bahwa dari semua kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat, separohnya ada di Kota Padang. Bahkan temuan kasus baru HIV di Kota Padang juga mengalami peningkatan yang sangat mencemaskan. Kasus baru yang ditemukan terus mengalami peningkatan, 53 orang pada tahun 2013, 164 pada tahun 2014, dan 291 pada tahun 2017.

Kasus HIV/AIDS yang tinggi tersebut telah terbukti sebahagian besarnya ditularkan melalui penggunaan NAPZA suntik dan prostitusi. Prostitusi tersebut termasuk didalamnya penularan langsung dari Wanita Pekerja Seks (WPS) dan penularan dari transaksi seksual dengan waria. Terlebih lagi, disaat kasus penularan baru karena penggunaan NAPZA suntik menurun, justru kasus terkait transaksi seksual meningkat. Meskipun ada kasus-kasus tertular dengan cara lain, namun selalu terkait awalnya dengan kedua kelompok perilaku tersebut. Penderita yang terinfeksi melalui jalur lain, merupakan korban sekunder dari salah satu pelaku penggunaan NAPZA atau terlibat dalam prostitusi, misalnya ibu rumah tangga, dan selanjutnya bayi baru lahir.

Melihat fakta risiko penularan HIV/AIDS ini, seharusnya Padang dan Sumatera Barat jauh dari masalah penyakit ini. Provinsi Sumatera Barat atau Minangkabau adalah negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menempatkan norma akhlak diatas segala sistem nilai yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat di negeri ini sangat menolak tindakan asusila, prostitusi dan segala bentuk perbuatan yang mendekati ke arah itu. Namun ironisnya, fakta yang ditemukan oleh pihak berwajib dan peneliti-peneliti sosial justru sebaliknya. Adalah jamak dan tidak pernah habisnya dilakukan penangkapan wanita pekerja seks (WPS) oleh pihak berwajib, baik WPS langsung ataupun WPS terselubung.

Temuan awal kita di Kota Padang, dengan melakukan analisis data terhadap WPS, petugas kesehatan, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Padang menunjukkan bahwa keberadaan prostitusi di negeri ini tidak lagi *tersembunyi*. Praktek-praktek prostitusi dilakukan para-WPS secara terselubung dibalik usaha lain yang dilakukannya. Bahkan, dengan maraknya penggunaan telepon genggam dan media sosial, diantara WPS menjadikan transaksi seksualnya menjadi lebih tertutup dari jangkauan orang lain, yang hanya pelaku, perantara, dan pelanggannya yang tahu. Sedangkan untuk tempatnya

mereka bisa melakukan di mana saja, sesuai kesepakatan mulai dari rumah kos, kontrakan, hotel melati, hingga hotel berbintang sekalipun.

Analisis data kita terhadap lebih tiga puluh WPS menunjukkan bahwa alasan kemiskinan dan rendahnya kontrol sosial menjadi penyumbang terbesar terjadinya prostitusi, yang pada akhirnya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS. Meskipun terdapat alasan-alasan lain yang sebenarnya lebih mendasar seperti kontrol kepribadian yang lemah dan rendahnya pemahaman nilai-nilai akhlak dan agama, namun hampir semua pelaku berdalih tidak adanya yang membiayai kebutuhan keluarganya. Kondisi ini menjadikan mereka sangat tergantung secara ekonomi terhadap transaksi seksual yang mereka lakukan. Hal ini menjadikan mereka mempunyai posisi tawar yang lemah dihadapan pelanggannya. Sehingga tidaklah mungkin bagi WPS tersebut menyuruh pelanggannya untuk melakukan hubungan seks yang aman seperti menggunakan kondom. Justru mereka cenderung mengikuti kemauan pelanggannya. Bagi mereka, kehilangan pelanggan berarti kehilangan sumber keuangan.

Posisi tawar yang lemah yang terbukti menjadikan hubungan seksual pada prostitusi sangat rendah proteksinya terhadap penularan penyakit menularan seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS yang digalakkan secara internasional yang diadopsi di Indonesia dengan pendekatan harm reduction (menurunkan bahaya), melalui penyuluhan dan pemberian kondom gratis tidaklah bisa mencegah peningkatan kasus HIV/AIDS di negeri ini.

Hal ini telah terbukti, sejak satu dekade strategi ini telah diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Papua, dan berbagai daerah lainnya; namun yang terjadi justru kasus selalu meningkat. Oleh karena itu, cara yang tepat sesuai kondisi sosial budaya Indonesia khususnya Sumatera Barat dan Kota Padang adalah dengan mencegah agar prostitusi tersebut tidak terjadi.

Segegap lapisan masyarakat perlu melakukan kontrol sosial terhadap lingkungannya, untuk mencegah terjadinya prostitusi. Dukungan sosial terhadap segegap anggota keluarga yang terlihat kurang secara ekonomi, dalam suku dan nagari harus ditumbuhkan kembali dan ditingkatkan untuk mencegahnya terjerumus ke dalam prostitusi. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, pembinaan akhlak nilai-nilai agama bagi segegap generasi menjadi mutlak, baik laki-laki ataupun perempuan. Pemahaman nilai-nilai tersebut bagi kaum lelaki menjadi jauh lebih penting, karena prostitusi ada dan bertahan karena ada yang menjadi pelanggan dan menghidupkannya. (*)

****) Penulis adalah Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang., Sumbar. Alumnus Program Doktor, Ilmu Kedokteran, Adelaide, Australia, Email: hardisman@fk.unand.ac.id***

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

